



Pemanfaatan Media Banner sebagai Media Informasi Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Lontio Baru Kecamatan Nambo

Utilization of Banner Media as Public Service Information Media at the Lontio Baru Sub-district Office, Nambo District

Ade Putra Ode Amane^{1*}, Juwita S. Ibrahim², Riyadh Rofiq Mokali³, Aditya Saputra Libuka⁴, Ferdiansyah Lahaya⁵

¹⁻⁵ Universitas Muhammadiyah Luwuk, Indonesia

*Penulis Korespondensi: putrohade@gmail.com

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 25 April 2026;

Revisi: 22 Mei 2026;

Diterima: 27 Juni 2026;

Terbit: 30 Juni 2026

Keywords: Banner Media; Public Service; Service Transparency; Village Information; Visual Communication.

Abstract. The availability of information media at the village office is a basic need in supporting transparent and efficient public services. This activity aims to provide visual information media in the form of service banners at the Lontio Baru Village Office, Nambo District. During the internship period from April to June 2026, it was found that residents often had difficulty understanding administrative procedures due to the lack of information media in the waiting room. Data was collected through participatory observation, unstructured interviews with three informants (the Village Head and 2 village staff), and field documentation. The method used is qualitative descriptive with a participatory approach. Through the stages of observation, coordination, design, printing, and installation, 1 unit of X-banner was produced containing information on ID card requirements, family card requirements, service hours, and service flow. The banner was installed at the entrance of the office. The results of the activity show that having banners helps people get service information on their own, reduces the frequency of repeated questions about administrative requirements, and supports a more orderly and efficient service process

Abstrak

Ketersediaan media informasi di kantor kelurahan merupakan kebutuhan mendasar dalam mendukung pelayanan publik yang transparan dan efisien. Kegiatan ini bertujuan menyediakan media informasi visual berupa banner pelayanan di Kantor Kelurahan Lontio Baru, Kecamatan Nambo. Selama periode magang April–Juni 2026, ditemukan bahwa warga sering kesulitan memahami prosedur administrasi akibat tidak tersedianya media informasi di ruang tunggu. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara tidak terstruktur dengan tiga informan (Lurah, 2 staf kelurahan), dan dokumentasi lapangan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan partisipatif. Melalui tahapan observasi, koordinasi, desain, cetak, dan pemasangan, dihasilkan 1 unit X-banner yang memuat informasi persyaratan Kartu Tanda Penduduk (KTP), persyaratan Kartu Keluarga (KK), jam dan alur pelayanan. Banner dipasang di depan pintu masuk kantor. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa keberadaan banner membantu masyarakat memperoleh informasi pelayanan secara mandiri, mengurangi frekuensi pertanyaan berulang mengenai persyaratan administrasi, serta mendukung proses pelayanan yang lebih tertib dan efisien.

Kata Kunci: Banner Media; Informasi Desa; Komunikasi Visual; Pelayanan Publik; Transparansi Pelayanan.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu komunikasi telah membawa perubahan besar dalam cara manusia bertukar informasi. Komunikasi kini tidak lagi terbatas pada percakapan langsung antarindividu, tetapi juga berkembang melalui penggunaan berbagai jenis media, mulai dari media cetak, elektronik, hingga media luar ruang (Djerubu dkk., 2022). Salah satu media luar

ruang yang masih banyak digunakan karena dinilai praktis dan efektif ialah banner. Keberadaan banner membantu penyampaian informasi kepada masyarakat secara lebih cepat, mudah dibaca, serta mudah dipahami oleh berbagai kalangan (Saniscara, 2022).

Secara umum, komunikasi dapat dipahami sebagai kegiatan penyampaian pesan dari seseorang kepada pihak lain dengan memanfaatkan media tertentu agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai (Daryanto, 2014). Dalam pelayanan publik, komunikasi yang efektif antara aparatur kelurahan dan masyarakat memegang peranan yang sangat penting. Jika informasi mengenai alur atau persyaratan pelayanan tidak dijelaskan dengan baik, hal tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, antrean yang kurang tertib, hingga menurunkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan (Taufiq dkk., 2021).

Salah satu organisasi pelayanan publik yang berurusan langsung dengan masyarakat mengenai masalah administratif adalah Kantor Kelurahan Lontio Baru di Kecamatan Nambo. Sebagai pusat layanan, kantor kelurahan sangat penting, terutama dalam mengelola berbagai dokumen demografis seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), surat domisili, dan persyaratan administratif lainnya. Pada kenyataannya, banyak warga yang masih datang tanpa mengetahui protokol layanan atau apakah dokumen yang diperlukan sudah lengkap. Keadaan ini sering mengakibatkan proses pelayanan menjadi lebih lambat dan kurang efisien (Rini Kusumawati dkk., 2022a).

Pada era modern, pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah telah menjadikan pelayanan publik sebagai salah satu prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. ketika melaksanakan berbagai program dan inisiatif, Setiap organisasi pemerintah harus mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Karena, tersedianya layanan publik berkualitas tinggi merupakan harapan rakyat sekaligus tuntutan modern (Irfan dkk., 2023). Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia mengharuskan negara untuk menyediakan layanan publik guna memenuhi hak dan kebutuhan dasar setiap warga negara. Pemerintah dapat mencapai tata kelola yang lebih baik dan menumbuhkan kepercayaan publik dengan memberikan layanan yang berkualitas (Wahyono & Aditia, t.t.).

Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik, layanan publik juga telah mendapat perhatian yang signifikan di era otonomi daerah. Aturan ini menekankan kebutuhan akan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sebagai dasar bagi administrasi pemerintahan. Pemerintah yang mampu menjalankan tugasnya seefektif mungkin akan mendukung hak asasi manusia dan demokrasi, meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan budaya, menurunkan tingkat kemiskinan, serta melindungi lingkungan dan

masyarakat. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Wahyono & Aditia, t.t.).

Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tahun 2023 menunjukkan bahwa indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Indonesia baru mencapai rata-rata 3,56 dari skala 4, dengan salah satu faktor penghambat utamanya adalah ketidakjelasan informasi prosedur pelayanan (“Laporan Kepuasan Pelayanan Informasi Publik,” t.t.). Sementara itu, laporan Ombudsman Republik Indonesia tahun 2022 mencatat bahwa ketiadaan papan informasi atau media komunikasi visual di unit pelayanan publik masih menjadi salah satu bentuk maladministrasi yang paling sering ditemukan, khususnya di tingkat kelurahan dan desa. Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ketersediaan media informasi yang memadai secara signifikan meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan. Dengan demikian, penyediaan media informasi visual di kantor kelurahan bukan sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan mendasar dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel (Rini Kusumawati dkk., 2022b).

Selama periode magang dari April hingga Juni 2026 di Kantor Kelurahan Lontio Baru, penulis berkesempatan mengamati secara langsung proses pelayanan administrasi kependudukan. Dari pengamatan ditemukan beberapa masalah konkret: (1) tidak tersedia satupun media informasi visual di ruang tunggu (2) warga yang datang mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau KK sering tidak membawa kelengkapan dokumen karena tidak mengetahui persyaratannya terlebih dahulu; (3) rata-rata 5-10 pertanyaan berulang diajukan kepada petugas setiap harinya hanya terkait prosedur dan persyaratan; dan (4) proses pelayanan sering tertunda akibat warga harus pulang untuk melengkapi berkas. Kondisi ini sejalan dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan badan publik menyediakan informasi pelayanan yang mudah diakses oleh masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut, dipilih media banner sebagai solusi komunikasi yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Kantor Kelurahan Lontio Baru. Dibandingkan dengan media informasi lain seperti papan pengumuman konvensional yang memerlukan pembaruan manual setiap saat, media digital/layar yang membutuhkan biaya pengadaan dan pemeliharaan tinggi, atau brosur yang mudah hilang dan tidak efisien, banner memiliki sejumlah keunggulan: (1) biaya produksi relatif rendah dengan ketahanan jangka panjang; (2) dapat ditempatkan secara permanen di titik strategis yang mudah dilihat; (3) mampu menampilkan informasi secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami oleh semua kalangan termasuk yang tidak melek digital; serta (4) tidak memerlukan keahlian teknis khusus

untuk pengoperasiannya. Dengan demikian, banner merupakan pilihan yang tepat, terjangkau, dan efektif sebagai media informasi pelayanan publik di tingkat kelurahan (Fadli dkk., 2020)

Berbagai Penelitian terdahulu telah membahas pemanfaatan media informasi berbasis digital maupun papan informasi elektronik dalam pelayanan publik. Namun, penelitian mengenai pemanfaatan media banner sebagai sarana informasi pelayanan publik pada tingkat kelurahan masih relatif terbatas, khususnya pada wilayah yang memiliki keterbatasan sarana teknologi informasi. Oleh karena itu, kegiatan ini penting dilakukan untuk mengkaji efektivitas media banner sebagai media komunikasi visual yang sederhana namun mampu meningkatkan akses informasi pelayanan masyarakat.

Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada penggunaan media digital dan system informasi berbasis elektronik dalam pelayanan publik. Namun, kajian mengenai efektivitas media banner sebagai sarana informasi pelayanan publik pada tingkat kelurahan masih relatif terbatas, terutama pada daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur teknologi informasi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut melalui kajian pemanfaatan media banner di Kelurahan Lontio Baru.

2. KAJIAN TEORI

Menurut Para Ahli, Definisi Inovasi Menurut Para Ahli, Definisi: Inovasi adalah "sebuah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau organisasi yang mengadopsinya", menurut definisi Rogers. Rogers menyatakan bahwa keberhasilan inovasi bergantung pada proses adopsi dan komponen seperti komunikasi dan persepsi manfaat. Ia juga menekankan lima ciri inovasi yang mempengaruhi tingkat adopsi: keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, triabilitas, dan observabilitas. (Tisna Regiana et al., 2024). Teori Holistik Goldstein menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital dalam layanan publik harus dilihat secara keseluruhan dan menyeluruh daripada hanya melihat bagian-bagiannya. Dia berpendapat bahwa setiap komponen sistem, termasuk manusia, teknologi, proses, budaya, dan tujuan, harus dipahami secara terintegrasi agar keuntungan maksimal diperoleh. (Resdiana et al., 2026).

Teori Model Pembelajaran Sosial (Bandura) berpendapat bahwa observasi dan imitasi adalah cara terbaik untuk belajar. Leaflets, misalnya, berfungsi sebagai alat untuk membantu proses ini dengan menyajikan informasi yang mudah dipahami dan diulang-ulang. Metode ini dapat meningkatkan pengetahuan dan menanamkan sikap positif untuk mencegah penyakit. Teori Media dan Komunikasi Kesehatan (Kumar & Lee) Menurut Kumar dan Lee, alat promosi kesehatan seperti leaflet dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan pengetahuan

masyarakat tentang penyakit tertentu. Mereka juga menyatakan bahwa media visual dan teks yang mudah dicerna sangat penting untuk keberhasilan dalam edukasi masyarakat, termasuk orang tua. (Batalipu et al., 2024).

3. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode partisipatif. Pendekatan tersebut dipilih karena peneliti terlibat secara langsung dalam proses pengamatan, perencanaan, hingga pelaksanaan solusi di lapangan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 28 April–20 Mei 2026, bertempat di Kantor Kelurahan Lontio Baru, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.

data yang digunakan meliputi tiga metode: (1) Observasi partisipatif peneliti mengamati langsung kondisi ruang pelayanan dan mengikuti alur pelayanan harian selama periode magang; (2) Wawancara tidak terstruktur dilakukan kepada 3 informan, yakni Lurah Lontio Baru sebagai informan utama dan 2 staf kelurahan sebagai informan pendukung, untuk menggali kebutuhan informasi masyarakat; dan (3) Dokumentasi berupa foto kondisi awal ruang tunggu, proses koordinasi, proses desain dan cetak banner, serta kondisi setelah pemasangan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak proses observasi hingga kegiatan pemasangan banner selesai dilaksanakan.

kegiatan diawali dengan observasi di Kantor Kelurahan Lontio Baru, dilanjutkan koordinasi bersama lurah dan staf kelurahan, kemudian perancangan desain banner, pencetakan, dan pemasangan di titik yang telah ditentukan. Mahasiswa yang berada di Posko Kelurahan Lontio Baru berperan sebagai pelaksana sekaligus pendamping selama proses berlangsung. Alur kegiatan secara ringkas: Observasi (28 April) → Koordinasi (5 Mei) → Desain Banner (6–15 Mei) → Cetak Banner (16–19 Mei) → Pemasangan (20 Mei)

Tabel 1. Rincian tahapan pelaksanaan kegiatan.

Tahapan Pelaksanaan	Kegiatan	Metode	Materi
Observasi	Melakukan observasi Kantor Kelurahan Lontio Baru, Kecamatan Nambo, memperoleh informasi pelayanan.	Pertemuan dengan pemerintah/staf kelurahan	guna melihat secara langsung proses pelayanan kepada masyarakat serta meninjau ketersediaan media informasi yang digunakan untuk membantu warga
Koordinasi	Melakukan koordinasi bersama lurah dan aparat kelurahan untuk menentukan titik lokasi penempatan banner pelayanan	Pertemuan dengan pemerintah/staf kelurahan	Pembahasan terkait isi banner, meliputi data, informasi, serta persyaratan administrasi pada setiap jenis layanan yang akan ditampilkan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat
Pelaksanaan	Melaksanakan proses pencetakan X banner menggunakan bahan yang kuat dan tahan lama sehingga media informasi tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih panjang	Pertemuan dengan pemerintah/staf kelurahan	Melakukan pemasangan banner pada titik lokasi yang sebelumnya telah ditentukan bersama, sebagai bentuk dukungan terhadap pelayanan informasi kepada masyarakat

4. HASIL

Hasil observasi menunjukkan bahwa keberadaan banner yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai persyaratan administrasi kependudukan. Sebelum pemasangan banner, masyarakat harus bertanya secara langsung kepada petugas untuk memperoleh informasi pelayanan. Setelah pemasangan banner, Sebagian besar informasi dasar dapat diperoleh secara mandiri oleh masyarakat sehingga mengurangi beban komunikasi petugas pelayanan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa banner berfungsi sebagai media komunikasi visual yang mendukung prinsip transparansi pelayanan publik. kondisi ini sejalan dengan teori komunikasi yang dikemukakan Daryanto (2014) bahwa media komunikasi berperan memperjelas pesan sehingga dapat diterima secara lebih efektif oleh khalayak.

Berdasarkan perspektif komunikasi publik, banner merupakan media komunikasi satu arah yang berfungsi menyampaikan informasi secara cepat kepada masyarakat. Meskipun sederhana, media ini memiliki keunggulan dalam menjangkau seluruh kelompok masyarakat tanpa memerlukan kemampuan literasi digital. Oleh karena itu, banner masih relevan digunakan sebagai media informasi publik pada tingkat kelurahan.

Setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat melalui program magang, Kantor Kelurahan Lontio Baru di Kecamatan Nambo kini memiliki media informasi visual berupa banner pelayanan yang ditempatkan di lokasi strategis untuk membantu masyarakat

memahami berbagai prosedur administrasi. Banner tersebut dipasang di satu titik yang terlihat jelas oleh pengunjung, yakni di depan pintu masuk kantor. Berdasarkan hasil kegiatan, media banner memuat sejumlah informasi penting yang selama ini menjadi pertanyaan berulang dari warga, meliputi persyaratan pengurusan dokumen administrasi kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

Keberadaan banner memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan selama berada di kantor kelurahan (Bharata & Fauziyah, 2022). Informasi yang tersedia dapat dibaca secara langsung kapan saja tanpa harus menunggu penjelasan dari petugas. Dengan demikian, penggunaan banner tidak hanya membantu warga memahami prosedur pelayanan dengan lebih cepat, tetapi juga mengurangi pertanyaan yang berulang kepada aparatur kelurahan sehingga proses pelayanan dapat berlangsung lebih efektif dan efisien (Pertiwi dkk., 2023).

Meskipun banner memiliki peran penting sebagai media penyampaian informasi, penggunaannya masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu permasalahan yang sering ditemui adalah sulitnya melakukan pembaruan informasi secara cepat karena banner merupakan media cetak yang bersifat permanen. Setiap perubahan informasi, baik terkait jadwal kegiatan, program pelayanan, maupun persyaratan administrasi terbaru, mengharuskan pihak kelurahan untuk membuat dan mencetak ulang banner yang baru (Tamami dkk., 2025).

Berdasarkan hasil observasi, pembaruan isi banner di Kantor Kelurahan Lontio Baru belum dilakukan secara rutin, khususnya pada informasi yang sering mengalami perubahan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan risiko penyampaian informasi yang kurang sesuai dengan keadaan terkini, sehingga masyarakat berpotensi memperoleh informasi yang sudah tidak berlaku lagi. Apabila hal ini terjadi secara berulang, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disediakan oleh kelurahan dapat menurun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Kelurahan Lontio Baru, sebelum pemasangan banner masyarakat sering menanyakan persyaratan administrasi yang sama secara berulang kepada petugas pelayanan. Kondisi tersebut menyebabkan petugas harus memberikan penjelasan yang sama kepada setiap pengunjung sehingga pelayanan menjadi kurang efisien. Setelah banner dipasang, masyarakat dapat membaca informasi secara mandiri sebelum mengajukan permohonan pelayanan.

Temuan ini sejalan dengan pendapat (Daryanto, 2014) yang menyatakan bahwa media komunikasi berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan yang mampu meningkatkan efektivitas proses komunikasi. Banner sebagai media visual membantu menyederhanakan

informasi pelayanan sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat dibandingkan penyampaian secara lisan.

Selain kendala pembaruan informasi, aspek pendanaan juga menjadi tantangan tersendiri dalam pemanfaatan banner. Proses desain, produksi, hingga pemasangan banner memerlukan biaya yang harus dialokasikan dari anggaran operasional kelurahan. Oleh karena itu, keterbatasan dana yang tersedia sering kali memengaruhi kemampuan kelurahan untuk memperbarui atau menambah media informasi secara optimal sesuai kebutuhan masyarakat.

Observasi Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 April 2026 di Kantor Kelurahan Lontio Baru, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai. Pada tahap ini, mahasiswa melakukan observasi langsung terhadap kondisi ruang pelayanan, ketersediaan media informasi, dan alur pelayanan yang berlaku. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik: (1) observasi partisipatif dengan mengikuti langsung kegiatan di kantor kelurahan; (2) wawancara tidak terstruktur dengan Lurah Lontio Baru selaku informan utama dan dua staf kelurahan sebagai informan pendukung; serta (3) dokumentasi berupa foto kondisi ruang tunggu dan area pelayanan. Dari observasi diketahui bahwa belum tersedia satupun media informasi visual di ruang tunggu, sehingga warga harus bertanya langsung kepada petugas untuk setiap kebutuhan informasi. Sebagaimana tampak pada Gambar 1, mahasiswa magang berdiskusi langsung dengan Lurah Kelurahan Lontio Baru guna memperoleh gambaran menyeluruh tentang permasalahan informasi pelayanan yang dihadapi.



Gambar 1. Kegiatan Observasi dan Diskusi Bersama Lurah Kelurahan Lontio Baru Mengenai Kebutuhan Media Informasi Pelayanan, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai.

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2026.

Koordinasi Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2026 di Kantor Kelurahan Lontio Baru, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai. Kegiatan dilakukan melalui koordinasi dengan pegawai kantor kelurahan terkait rencana pemasangan banner informasi pelayanan. Pembahasan difokuskan pada penentuan lokasi pemasangan yang strategis, isi informasi yang akan ditampilkan, desain media yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta waktu

pelaksanaan pemasangan. Dari hasil koordinasi disepakati bahwa banner akan memuat informasi persyaratan KTP, dan persyaratan KK. serta akan dipasang di satu titik strategis: depan pintu masuk.



Gambar 2. Koordinasi Penyusunan Konten dan Penentuan Lokasi Pemasangan Banner Informasi Pelayanan Bersama Pegawai Kantor Kelurahan Lontio Baru. Sumber: Dokumentasi Penulis, 2026.

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 di Kantor Kelurahan Lontio Baru, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai. Sebanyak 1 unit X-banner berukuran standar (60 x 160 cm) telah dicetak menggunakan bahan flexi yang tahan lama. Banner memuat informasi mengenai persyaratan administrasi kependudukan yang paling sering dibutuhkan masyarakat, yaituur pengurusan KTP (fotokopi KK, surat pengantar RT/RW, dan pas foto) serta persyaratan pengurusan Kartu Keluarga (KK), termasuk dokumen pendukung yang diperlukan. Setelah banner selesai dicetak, pemasangan dilakukan pada satu titik yang telah disepakati: di depan pintu masuk kantor. Posisi, ketinggian, dan sudut keterbacaan diperhatikan agar seluruh pengunjung dapat membaca informasi dengan mudah. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3, pemasangan banner dilakukan secara langsung oleh mahasiswa magang bersama staf kelurahan. Setelah pemasangan, dilakukan verifikasi bahwa seluruh teks pada banner dapat terbaca dengan jelas dari jarak normal pengunjung.

Keberhasilan kegiatan ditunjukkan oleh tersedianya satu unit X-banner informasi pelayanan yang memuat persyaratan administrasi kependudukan, terpasangnya banner pada lokasi strategis yang mudah dijangkau masyarakat, serta meningkatnya kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi pelayanan secara mandiri.



Gambar 3. Proses Pemasangan X-Banner Informasi Pelayanan Oleh Mahasiswa Magang dan Staf di Kantor Kelurahan Lontio Baru, Kecamatan Nambo. Sumber: Dokumentasi Penulis, 2026.



Gambar 4. Desain X-Banner Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (KTP dan KK) Kantor Kelurahan Lontio Baru. Sumber: Dokumentasi Penulis, 2026.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemanfaatan media banner di Kantor Kelurahan Lontio Baru terbukti mendukung peningkatan akses informasi pelayanan publik bagi masyarakat. Banner yang memuat informasi persyaratan administrasi kependudukan membantu masyarakat memperoleh informasi secara mandiri sebelum mengajukan pelayanan. Keberadaan media informasi tersebut berkontribusi terhadap pengurangan pertanyaan berulang kepada peetugas, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta memperkuat implementasi prinsip keterbukaan informasi publik di tingkat kelurahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lurah dan seluruh staf Kantor Kelurahan Lontio Baru yang telah memberikan dukungan dan kerja sama selama pelaksanaan kegiatan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing lapangan yang telah memberikan arahan selama proses perencanaan, pelaksanaan, hingga penyusunan artikel ini. Selain itu, penulis juga berterima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang turut membantu sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Bharata, W., & Fauziyah, R. (2022). Revitalisasi prasarana papan informasi di lingkungan Desa Sangkuliman. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 120–125. <https://doi.org/10.35311/jmpm.v3i2.79>
- Daryanto. (2014). *Teori komunikasi*. Penerbit Gunung Samudera.
- Dewi, N. N. S. A., Wardani, R. W. K., Mulyono, T. T., Indriastuti, Y., & Wahyuni, S. (2022). *Pengantar ilmu komunikasi*. Pradina Pustaka.
- Fadli, A., Purnomo, W. H., Sugiyanto, G., & Aliim, M. S. (2020). Utilization of digital information boards as media information in rural areas. *Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.35877/454RI.mattawang173>
- Hardiyansyah. (2018). *Kualitas pelayanan publik: Konsep, dimensi, indikator dan implementasinya*. Gava Media.
- Hashimov, E. (2015). Qualitative data analysis: A methods sourcebook and the coding manual for qualitative researchers. *International Journal of Qualitative Methods*, 14, 1–3. <https://doi.org/10.1080/10572252.2015.975966>
- Irfan, M., Aiyub, A., Nurhafni, N., Chalirafi, C., & Matriadi, F. (2023). Optimization of public services. *International Journal of Public Administration Studies*, 3(1), 8. <https://doi.org/10.29103/ijpas.v3i1.12328>
- Kusumawati, R., Rahmadanik, D., & Hariyoko, Y. (2022). Optimization of population administration services with the use of Klampid New Generation in Pacarkembang Village. *Formosa Journal of Social Sciences*, 1(4), 485–494. <https://doi.org/10.55927/fjss.v1i4.2273>
- Pertiwi, A. B., Budiman, B., Farid, R., Benyamin, M. F., & Rinaldi, M. (2023). Poster infografis sebagai media penyajian data tentang Desa Karyawangi. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(10), 4099–4111. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i10.11730>
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Sekretariat Negara.
- Rulli, N. (2022). *Media sosial perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Simbiosis Rekatama Media.

- Saniscara, P. (2022). Media luar ruang serta dampaknya terhadap kualitas dan lingkungan hidup masyarakat. *Jurnal Dimensi DKV Seni Rupa dan Desain*, 7(2), 163–174. <https://doi.org/10.25105/jdd.v7i2.15168>
- Tamami, N., Ramadhan, C. I., Alfathdyanto, K., et al. (2025). Implementasi media informasi berbasis running text untuk meningkatkan efisiensi penyampaian informasi. *J-Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 10(2), 254–260. <https://doi.org/10.25047/j-dinamika.v10i2.5625>
- Taufiq, T., Maldun, S., & Nurkaidah, N. (2021). Komunikasi aparatur desa terhadap peningkatan pelayanan publik. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 2(2), 67–73. <https://doi.org/10.35965/jpan.v2i2.566>
- Wahyono, T., & Aditia, R. (t.t.). Unsur-unsur komunikasi pelayanan publik: Sebuah tinjauan literatur.